JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI SAMUDRA (JMAS)
Volume 6 Nomor 2, April 2025. HALAMAN 103 - 116
e- ISSN : 27970086
p- ISSN : 27970434

DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA LANGSA

Farda Finta Syahputri[a], Tuti Meutia[b*], Iqlima Azhar[c]
[abc] Falkutas Ekonomi, Universitas Samudra
[b*]*Corresponding author: tuti_meutia@unsam.ac.id*

Abstract

This study aims to examine the impact of Good Corporate Governance, Accounting Information Systems, and the Government Internal Control System (SPIP) on the quality of financial reports in the Regional Apparatus Organization (OPD) of Langsa City. The sample selection in this study used purposive sampling, which included 36 Regional Apparatus Organizations (OPDs) in Langsa City. Data was collected by distributing questionnaires to 144 respondents. The data obtained were analyzed using the SPSS (Statistical Product and Service Solutions) program. The results of this study indicate that (1) Good Government Governance partially has a positive but insignificant effect on the quality of financial reports in OPDs in Langsa City, (2) Accounting Information Systems partially have a positive and significant effect on the quality of financial reports in OPDs in Langsa City, (3) The Government Internal Control System partially has a positive and significant effect on the quality of financial reports in OPDs in Langsa City, and (4) Good Government Governance, Accounting Information Systems, and the Government Internal Control System simultaneously have a positive and significant effect on the quality of financial reports in OPDs in Langsa City.

Keywords: *Good Government Governance, Accounting Information System, Government Internal Control System, Quality of Financial Reports, Regional Apparatus Organization.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh *Good Government Governance*, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Langsa. Pemilihan sampel pada penelitian ini ialah menggunakan metode purposive sampling yaitu 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Langsa. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 144 responden. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solutions). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) *Good Government Governance* secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Kota Langsa (2) Sistem Informasi Akuntansi secara parsial berpengaruh posif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Kota Langsa. (3) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Kota Langsa dan (4) Good *Government* Governance, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Kota Langsa. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu penelitian hanya dilakukan pada OPD Kota Langsa dan tidak mencakup seluruh OPD di tingkat provinsi, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke daerah lain dengan karakteristik yang berbeda. Berdasarkan keterbatasan tersebut, maka disarankan untuk peneliti selanjutnya memperluas sampel penelitian.

Kata Kunci: Good Government Governance, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan, Organisasi Perangkat Daerah

PENDAHULUAN

Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah harus memenuhi standar kualitas yang tinggi karena banyak pihak yang bergantung pada informasi tersebut untuk berbagai keperluan. Keberhasilan pemerintah dapat diukur dari kualitas laporan keuangan yang mereka hasilkan, yang dianggap baik jika mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Setiap pemerintah daerah wajib menerbitkan laporan keuangan dan menjalani audit oleh BPK. (Imelda dkk, 2024)

Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan dengan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akan memberikan informasi yang lebih jelas dan dapat dipercaya bagi publik mengenai pengelolaan keuangan negara.

Peraturan tersebut juga mengatur penerapan SAP berbasis akrual yang menyempurnakan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi terkait posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan alokasi sumber daya. Laporan ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Dalam Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2023, pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan harus mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, mencakup aset, kewajiban, pendapatan, dan belanja. Qanun ini juga mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat diakses publik dan mencegah penyalahgunaan dana.

Meskipun laporan keuangan pemerintah Kota Langsa berhasil memperoleh opini WTP, tetap terdapat catatan dan rekomendasi dari BPK untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, BPK juga menemukan kelemahan dalam pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan yang berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kualitas laporan keuangan harus terus diperbaiki untuk mencapai standar yang lebih tinggi.

Tabel 1 Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Laporan	Hasil Pemeriksaan
Pendapatan	1. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada dua OPD kurang memadai 2. Pengelolaan Zakat dan Infaq belum memadai
Belanja	1. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal pada enam OPD sebesar Rp 2.074.690.557,00 2. Kelebihan Pembayaran atas Belanja Pegawai sebesar Rp36.311.738,00 3. Perangkapan Tugas dan Fungsi dalam tim Pegawai yang sama pada BPKD sebesar Rp 129.570.000,00 4. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada 11 OPD sebesar Rp 79.333.238,00

	5. Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa pada enam OPD Sebesar Rp 656.346.490,85 6. Kekurangan Volume atas tujuh paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp278.749.890,95 7. Kekurangan Volume atas empat pekerjaan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 70.216.614,65 8. Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan lanjutan Pembangunan Jalan Setapak Penghubung Jembatan Hutan Mangrove pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata sebesar Rp 46.772.751,41 9. Pertanggungjawaban Belanja Hibah belum tertib 10. Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial belum tertib
Aset	1. Penatausahaan Keuangan Daerah belum sesuai ketentuan 2. Penatausahaan dan Pengelolaan Persediaan belum memadai 3. Pengelolaan Aset belum sepenuhnya memadai

Sumber: Buku II Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Pemerintahan Kota Langsa, Tahun 2022

Fenomena kualitas laporan keuangan di Indonesia menarik untuk diteliti lebih lanjut. Di banyak instansi pemerintahan daerah, penyimpangan dalam penyusunan laporan keuangan ditemukan melalui audit BPK. Penyimpangan ini mencakup ketidaksesuaian data dengan peraturan yang berlaku, mengindikasikan kelemahan laporan keuangan (Purba et al., 2019).

Beberapa faktor mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, seperti *Good Goverment Governance* (GGG), sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern pemerintah (Sarwono, 2022). GGG bertujuan menciptakan pengelolaan instansi yang transparan melalui pengawasan manajemen dan memastikan akuntabilitas terhadap stakeholder (Setyautama, 2015).

Efektivitas laporan keuangan dipengaruhi penerapan GGG. Banyak instansi pemerintahan daerah yang belum sepenuhnya menerapkan GGG. Kekurangan dalam tata kelola, terutama hak-hak internal dan eksternal, mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Wijaya dan Wirawati, 2019). Penelitian Fahri (2021) juga menunjukkan dampak positif GGG terhadap laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh sistem informasi akuntansi. Pemerintah daerah harus menyediakan data akuntansi yang akurat dan relevan untuk pengelolaan keuangan. Manajer publik memerlukan informasi tepat waktu dan akurat. Teknologi sistem informasi akuntansi yang efisien dibutuhkan untuk kelancaran pengelolaan keuangan (Silviana, 2019; Masiaga, 2019).

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 mengatur penggunaan teknologi informasi dalam sistem akuntansi pemerintahan. Pejabat pemerintah diharuskan beralih dari sistem manual ke sistem komputerisasi dalam pengelolaan keuangan daerah (Hakiki dkk, 2021). Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan prinsip akuntansi yang berlaku.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berperan penting dalam memastikan tujuan pemerintah daerah tercapai. SPIP memberikan keyakinan atas ketepatan laporan keuangan, efisiensi program, dan kepatuhan terhadap peraturan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengatur prosedur memastikan akurasi laporan keuangan (Hakiki dkk, 2021).

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen, MC & Meckling (1976), teori keagenan atau agency theory dapat dijelaskan sebagai suatu hubungan kontrak antara prinsipal dan agen, di mana terdapat lebih dari satu individu yang terlibat dalam suatu kelompok organisasi. Dalam konteks ini, prinsipal adalah pihak yang membuat keputusan dan memberi mandat kepada agen untuk menjalankan segala aktivitas atas nama prinsipal.

Teori keagenan mengacu pada hubungan antara dua pihak yaitu, pihak agen dan *principal*. Dimana, pemerintah harus bertindak menjadi agen dalam penyampaian informasi yang berguna untuk pemegang laporan keuangan yang bertindak menjadi *principal* untuk menilai akuntabilitas pemerintah dan pengambilan keputusan.

Dalam hal ini pemerintah bertindak menjadi agen mempunyai keharusan menyampaikan informasi yang berguna untuk pemegang laporan keuangan yang bertindak menjadi principal untuk menilai akuntabilitas pemerintah dan melakukan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial, dan juga politik. (Modo, Saerang, & Poputra 2016).

Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Haryanto (2013), kualitas diartikan sebagai tingkat kesesuaian dengan standar, yang diukur berdasarkan kadar kesesuaian, dan dicapai melalui proses pemeriksaan. Laporan keuangan dianggap sebagai informasi yang berguna bagi pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan yang disusun dengan baik dan benar, sesuai dengan prinsip akuntansi, serta dapat dipahami oleh pengguna informasi tersebut.

Menurut (Annisa, 2014) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah diketahui laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai.

Good Government Governance

Menurut Segara (2017), "*good governance*" dalam konteks pemerintahan sering disebut dengan istilah *Good Government Governance* (GGG)". *Good government governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merujuk pada sistem pengelolaan yang

diterapkan dalam seluruh kegiatan publik, sehingga pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Menurut Azzindani & M. Irwan (2020), tata kelola pemerintahan yang baik atau *good government governance* adalah suatu sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan tindakannya berlandaskan pada prinsip-prinsip serta karakteristik tertentu. Dengan demikian, *good government governance* memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan iklim yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance* dalam sektor publik. Oleh karena itu, implementasi konsep tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan dukungan dan komitmen dari berbagai pihak, yakni negara (*state*), pemerintah (*government*), swasta (*private*), dan masyarakat (*society*) (Dhiyavani, 2017).

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan dari subsistem-subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan (Azhar Susanto, 2018). Organisasi pemerintah sangat bergantung pada sistem informasi akuntansi karena sistem informasi akuntansi memberikan data keuangan yang diperlukan untuk membantu pengambilan keputusan.

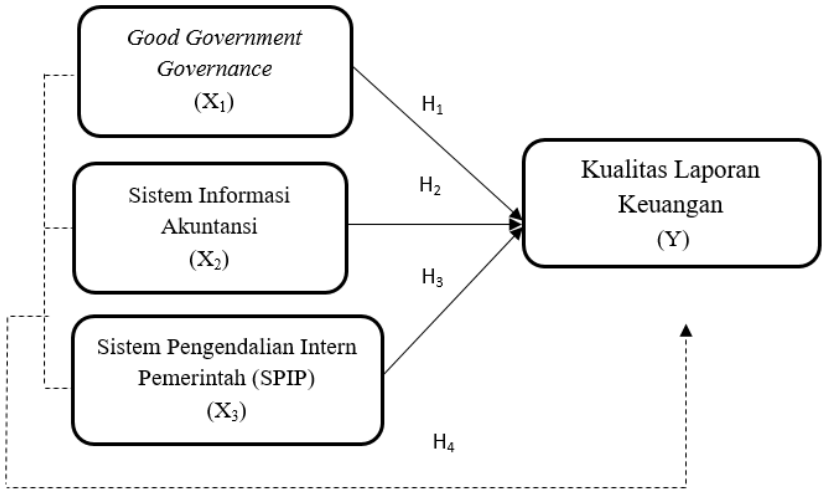
Menurut Azhar Susanto (2018), "Sistem informasi akuntansi merupakan rangkaian subsistem yang saling terhubung dan bekerja bersama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan". Dengan sistem informasi akuntansi yang baik, organisasi pemerintah dapat lebih mudah mengambil tindakan yang tepat, termasuk mengawasi operasional.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut Hakiki dkk (2021), mengutip American *Institute of Certified Public Accountants* (AICPA), sistem pengendalian intern pemerintah adalah struktur organisasi dan tindakan yang bertujuan menjamin keamanan, keakuratan aset, meningkatkan efektivitas operasional, serta menegakkan kebijakan manajemen. Sistem ini memberikan kepastian wajar, namun tidak bebas dari kelemahan seperti kesalahan manusia dan potensi pengesampingan proses pengendalian (Mulyati, Faridah, & Prawiranegara, 2019).

Permendagri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Pasal 1 menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah adalah serangkaian prosedur yang diterapkan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai efektivitas, efisiensi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penyajian keuangan daerah yang akurat (Aditya & Surjono, 2017).

Berdasarkan uraian latar belakang dan Model Penelitian, maka kerangka berfikir dapat dijelaskan pada gambar 1



Gambar 1 Model Penelitian

Keterangan:

⟶: Pengaruh Secara Parsial

- - - - - - - -▶: Pengaruh Secara Simultan

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, diperlukan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik serta laporan keuangan daerah melalui penerapan tata kelola yang baik dan bersih, tanpa adanya unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Mursidah dan Khairina (2018) menyimpulkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan, yang pada gilirannya menarik kepercayaan investor. Penerapan *good government governance* (GGG) juga penting untuk meminimalkan potensi kecurangan, meningkatkan efisiensi operasional, memastikan keandalan laporan keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Kualitas laporan keuangan akan meningkat jika didukung oleh *good goverment governance* yang baik

H_1 : *Good Government Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kemajuan inovasi data yang terus berkembang akan mempengaruhi banyak individu, termasuk mereka yang bekerja di instansi pemerintah yang telah memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional (Sihasale & Setiyowati, 2018). Semakin baik pemahaman dalam penggunaan sistem informasi akuntansi, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pun akan semakin berkembang. Berdasarkan PP Nomor 65 Tahun 2010, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah sistem yang menyimpan,

mengelola, dan menangani informasi administrasi moneter lokal serta informasi terkait lainnya. SIKD digunakan sebagai bahan dinamis dalam pengaturan, pelaksanaan, dan pelaporan tanggung jawab pemerintah daerah.

H_2 : Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem pengendalian intern pemerintah berfungsi untuk mengarahkan, mengevaluasi, dan mengukur sumber daya yang dimiliki oleh lembaga atau perusahaan, dengan tujuan utama mencegah dan mendeteksi kecurangan serta penggelapan. Penelitian Lestari & Trisna Dewi (2020) menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern yang baik berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Untuk mencapai tujuan organisasi, setiap lembaga atau perusahaan perlu menerapkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari manajemen risiko. Implementasi sistem pengendalian internal yang efektif akan memberikan jaminan yang cukup mengenai kualitas atau keandalan laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

H_3 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

Pengaruh *Good Government Governance*, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Rahmawati (2021) mengungkapkan bahwa penerapan *Good Government Governance* (GGG), Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) secara simultan memberikan pengaruh yang lebih kuat terhadap kualitas laporan keuangan dibandingkan jika diterapkan terpisah. Integrasi ketiga faktor ini menciptakan sinergi yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan informasi keuangan.

H_4 : *Good Government Governance*, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh simultan terhadap kualitas laporan keuangan

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh *good government governance*, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Langsa. Adapun objek penelitian ini yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Langsa.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu sumber data yang langsung berasal dari sumber aslinya. Data primer dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data tersebut diperoleh dengan menyebarkan kuesioner tertutup kepada responden, yaitu pegawai di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Langsa, dengan penilaian skala interval. Dalam penelitian ini, populasi yang ditargetkan adalah sebanyak 36 OPD pada Kota Langsa.

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan metode *Non Probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Indriantoro & Supomo, 2018). Sampel penelitian terdiri dari pegawai yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Langsa, dengan kategori sebagai berikut:

1. Kasubag Keuangan, Program dan Pelaporan
2. Operator Program, Bendahara
3. Operator Bendahara

Kriteria pemilihan sampel mencakup pegawai yang bekerja di bidang keuangan atau akuntansi dan pelaporan serta memiliki pemahaman terhadap standar akuntansi. Kriteria ini dipilih karena pihak tersebut dapat menggambarkan kualitas laporan keuangan dari setiap unit OPD dan mempresentasikan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan.

Pengumpulan data dilakukan secara langsung di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Langsa, dengan kuesioner disebarkan kepada pegawai di sana untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (*good government governance*, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern pemerintah) sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan, maka dilakukan analisis regresi sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	41,130	5,947		6,916	,000
	Good Government Governance	,024	,053	,038	,442	,639
	Sistem Informasi Akuntansi	,086	,060	,121	1,436	,035
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	,080	,055	,123	1,462	,046

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Output SPSS

Pada tabel 2 berdasarkan *unatandardized coefficients* (B) maka dapat ketahui konstanta dan koefisien regresi linear berganda persamaan 1 meting sing variabel sehingga dapat dibentuk suatu persamaan sebagai berikut

$$\mathbf{Y = 41{,}130 + 0{,}024X_1 + 0{,}086X_2 + 0{,}080X_3}$$

Berdasarkan regresi linear berganda persamaan 1 di atas, maka dapat diinterprestasikan koefisien regresi dari masing-masing variabel independen sebagai berikut:

1. Konstanta bernilai 41,130 menunjukkan bahwa apabila *good government governance*, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern pemerintah dianggap nol, maka nilai kualitas laporan keuangan adalah 41,130.

2. Koefisien variabel *good government governance* sebesar 0,024. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel kualitas laporan keuangan sebesar 1 poin, maka akan menaikkan nilai *good government governance* sebesar 0,024.
3. Koefisien variabel sistem informasi akuntansi sebesar 0,086. Artinya, apabila terjadi kenaikan nilai variabel kualitas laporan keuangan sebesar 1 poin, maka akan menaikkan nilai sistem informasi akuntansi sebesar 0,086.
4. Koefisien variabel sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 0,080. Artinya, apabila terjadi kenaikan nilai variabel kualitas laporan keuangan sebesar 1 poin, maka akan menaikkan nilai sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 0,080.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil dari uji koefisien determinasi dapat kita lihat pada table 5 berikut:

Tabel 3 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,583[a]	,434	,414	3,78238

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Good Government Governance

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Output SPSS

Pada tabel 3, nilai Adjusted R Square sebesar 41,4% menunjukkan bahwa variabel independen (*good government governance*, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern pemerintah) mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sisanya, 59,6%, dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4 Uji Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	41,130	5,947		6,916	,000
	Good Government Governance	,024	,053	,038	,442	,639
	Sistem Informasi Akuntansi	,086	,060	,121	1,436	,035
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	,080	,055	,123	1,462	,046

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan uji parsial yang ditampilkan pada tabel 4 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel *good government governance* memiliki t sebesar 0,442 dengan nilai signifikansi sebesar 0,639, karena nilai signifikansi > 0,05 maka *good corporate governance* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Variabel sistem informasi akuntansi memiliki t sebesar 1,436 dengan nilai signifikansi sebesar 0,035, karena nilai signifikansi < 0,05 maka sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Variabel sistem pengendalian intern pemerintah memiliki t sebesar 1,462 dengan nilai signifikansi sebesar 0,046, karena nilai signifikansi < 0,05 maka sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi sejauh mana variabel-variabel independen yang digunakan secara simultan mampu menjelaskan variabel dependen, hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,940	3	,647	1,362	,048[b]
	Residual	5,368	11	,306		
	Total	7,308	14			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Good Government Governance

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai F sebesar 1,362 dengan nilai signifikansi sebesar 0,048, karena nilai signifikansi < 0,05, maka hipotesis diterima, artinya variabel pengungkapan *good government governance*, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good government governance* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan nilai signifikan sebesar 0,639 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun GGG berpengaruh, pengaruhnya tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah saya lakukan, responden banyak yang kurang setuju dengan pernyataan "Pengembangan dan hubungan kerja pada pegawai dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban secara adil dan wajar". Hal ini dimaksud bahwa good government governance memiliki potensi untuk meningkatkan pengembangan dan hubungan kerja pegawai dalam organisasi pemerintah melalui prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat terhambat oleh birokrasi, keterbatasan sumber daya, atau faktor politik. Akibatnya, meskipun *good government governance* (GGG) berpengaruh positif, namun jika faktor-faktor eksternal dan internal lain yang tidak mendukung dapat membuat pengaruh tersebut menjadi tidak signifikan.

Penerapan GGG di Indonesia diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam menegakkan *good government governance* dalam birokrasi. Pemerintah berupaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kalsum dkk (2021) menyatakan bahwa GGG berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian ini, yang menunjukkan bahwa meskipun penerapan GGG dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, pengaruhnya tidak cukup kuat. Faktor eksternal dan internal perusahaan mempengaruhi hasil tersebut.

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan nilai signifikan sebesar 0,035 yang lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan SIA pada OPD Kota Langsa, maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan di lapangan, dimana responden sangat setuju dengan pernyataan "Teknik informasi merupakan alat yang berfungsi untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan sistem pelaporan keuangan dengan mempermudah dan mempercepat serta menciptakan keakuratan hasil, berupa laporan keuangan". Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa teknik informasi (seperti sistem informasi akuntansi berbasis teknologi) dapat mempermudah, mempercepat, dan menciptakan keakuratan dalam pelaporan keuangan. Hal ini membantu organisasi, termasuk pemerintah, dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Dalam penelitian ini, *Agency Theory* menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen). Konflik keagenan dapat terjadi karena asimetri informasi, di mana manajemen memiliki informasi lebih banyak dan bisa bertindak untuk kepentingannya sendiri. SIA berperan sebagai alat untuk mengurangi masalah ini dengan menyediakan informasi keuangan yang akurat dan transparan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiranti (2021) dan Gusherinsya & Samukri (2020) juga menunjukkan bahwa SIA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan SIA yang baik dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal, relevan, dan mudah dipahami, serta membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pemerintahan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan nilai signifikan sebesar 0,046 yang lebih kecil dari 0,05. Ini berarti semakin optimal penerapan sistem pengendalian intern, kualitas laporan keuangan akan semakin baik dan dapat diandalkan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dilapangan, responden sangat setuju dengan pernyataan "Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi". Pernyataan tentang rencana pengelolaan atau pengurangan risiko pelanggaran terhadap prosedur akuntansi memiliki kaitan langsung dengan kualitas laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan pimpinan yang aktif dalam mengelola risiko pelanggaran akan menghasilkan sistem pengendalian intern yang lebih baik, yang dapat meningkatkan keakuratan, transparansi, kepatuhan terhadap standar akuntansi, dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan secara signifikan, baik dalam sektor publik maupun swasta, karena laporan yang dihasilkan lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penerapan sistem pengendalian intern yang optimal dan berkelanjutan oleh manajemen dan staf memastikan kegiatan berjalan efektif dan efisien, serta pelaporan keuangan yang akurat. Hal ini sejalan dengan penelitian Darwis & Meliana (2020) yang menyatakan bahwa pengendalian intern yang baik menjaga kepatuhan dan menghasilkan laporan keuangan berkualitas.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Trisna Dewi (2020) juga menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik sistem pengendalian intern yang diterapkan, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan transparan.

Pengaruh *Good Government Governance*, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F sebesar 1,362 dengan nilai signifikansi 0,048 pada tingkat signifikan 0,05, yang menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Artinya, variabel *good corporate governance*, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

Good Government Governance (GGG) berperan sebagai mekanisme pengawasan yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. GGG yang baik memastikan laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan, serta meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Rahmawati (2021) juga menunjukkan bahwa penerapan GGG berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem informasi akuntansi berfungsi sebagai alat utama dalam pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan. Sistem yang efektif dapat meningkatkan keakuratan informasi keuangan, memfasilitasi audit, dan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memastikan bahwa kegiatan operasional berjalan sesuai rencana, mengurangi risiko kecurangan, dan mendukung kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gusherinsya & Samukri (2020) juga menunjukkan bahwa

penerapan SIA dan SPIP secara efektif dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan transparansi, dan mencegah manipulasi.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh *Good Government Governance*, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD di Kota Langsa, maka kesimpulan penelitian ini yaitu secara parsial *good government governance* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara simultan *good government governance*, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Kota Langsa.

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan, penelitian ini hanya dilakukan pada OPD Kota Langsa dan tidak mencakup seluruh OPD di tingkat provinsi, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke daerah lain dengan karakteristik yang berbeda. Pengukuran kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini bersifat subjektif, mengandalkan hasil kuisioner yang telah di isi oleh responden terhadap penerapan *Good Government Governance*, sistem informasi akuntansi, dan system pengendalian intern pemerintah. Penelitian ini menggunakan data yang terbatas pada periode waktu tertentu, sehingga tidak dapat menggambarkan perubahan yang mungkin terjadi dalam jangka panjang.

Adapun saran yang disimpulkan dari hasil penelitian ini adalah untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Langsa, terus memperkuat implementasi prinsip *Good Government Governance* (GGG) dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal untuk mendukung terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Untuk peneliti selanjutnya, hendaknya untuk memperluas penelitian sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang *good government governance*, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.

REFERENSI

Annisa, N. (2014). *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Konsep dan Pengukurannya*. **Jurnal Akuntansi Pemerintahan**, 10(1), 35-47.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa Tahun 2022. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Darwis, H., & Meliana. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. **E-Jurnal Unkhair**, 76-87.

M. D. Mutaqin, Tuti Meutia, adn Agustina Nurul Fajriah, "DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA", *JMAS*, vol.5, no. 6, pp. 327 - 345, Dec. 2024.

Fahri. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Gusherinsya, R., & Samukri, S. (2020). Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. ***Jurnal Akuntansi***, *9*(1), 58-68.

Hakiki, C., Luthfi, M., & Puspita, I. L. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi, Good Corporate Governance dan Komitmen Organisai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (SKPD Kabupaten Pesawaran). **Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen Malahayati**.

Imelda, N., Siti, H., & Agung, P. (2024). Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. **Jurnal Akuntansi dan Keuangan Pemerintahan**, 15(2), 45-60.

K.P. Lestari, Afrah Junita, and Iqlima Azhar,, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada OPD Kabupaten Deli Serdang)", *JMAS*, vol.4, no. 2, pp. 84 - 97, Apr. 2023.

Lestari, N. W., & Dewi, N. S.T (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. **Jurnal Krisna**, 170-178.

Mulyati, N. S., Faridah, E., & Prawiranegara, B. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. **Akuntanpedia**, 60-71.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010. (2010). *Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2010. (2010). *Peraturan Pemerintah tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 120, Lembaran Negara Nomor 4930

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019. (2019). Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Lembaran Negara Republik Indonesia.

Qanun Kota Langsa No. 1 Tahun 2023. (2023). Qanun Kota Langsa tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kota Langsa.

Sarwono, Norma Riza. (2022). Pengaruh *Good Corporate Governance*, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan. **Jurnal Manajemen dan Sains**, 7(2), 20-31.

Silviana (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Survey Pada Pemerintah Kabupaten Di Seluruh Jawa Barat. **Profita** Volume 6 nomor 01

Setyautama, Sam. (2015). **Memahami Laporan Keuangan**. Indeks, Jakarta.

Wijaya, I. I., & Wirawati, N. P. (2019). Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi Pengaruh Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility pada Nilai Perusahaan. **E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana**.